

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara yang konservatif baik secara sosial maupun keagamaan,<sup>1</sup> memiliki homogenitas budaya yang tinggi berdasarkan kesukuan dan berbagai afiliasi dalam Islam sehingga negara ini memiliki budaya yang unik dan kompleks. Akibatnya, sulit membedakan antara mana yang prinsip atau ajaran Islam dan mana yang budaya dan norma tradisional Arab.<sup>2</sup> Peran perempuan cenderung terbatas di ranah publik yang disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam membuat aturan dan kesepakatan bersama dalam masyarakat.

Berbagai gerakan yang dilakukan perempuan untuk mengemansipasi diri mereka sendiri banyak terinspirasi dari gerakan dan nilai yang berasal dari luar kawasan mereka dan hal tersebut tidak terlepas dari tingginya arus informasi yang datang akibat adanya teknologi internet dan peran sosial media seperti Facebook, Youtube dan Twitter.<sup>3</sup> Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial untuk menghimpun informasi dan aspirasi dari dan untuk komunitas mereka. Dengan adanya media sosial, perempuan bisa lebih mudah melakukan gerakan 'empowerment' untuk mengangkat status mereka di tengah masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki sebagai tradisi mereka sejak zaman dahulu.

---

<sup>1</sup>H.C. Metz., Saudi Arabia: A Country Study, (Washington: GPO for the Library of Congress 1992) <http://countrystudies.us/saudi-arabia/> (diakses tanggal 10 Juli 2018)

<sup>2</sup>A. E. Al Lily, "Online And Under Veil: Technology-Facilitated Communication And Saudi Female Experience Within Academia," *Technology in Society* 33 (2011), no. 1-2: 119-121

<sup>3</sup>Maurice Odone, "Arab Women Use Media to Address Inequality," *Routledge* 19 (April 2015), no. 2: 168

Larangan perempuan untuk mengemudi di Arab Saudi berawal dari norma tradisional masyarakat mengenai *male-guardianship* dimana perempuan tidak semestinya bepergian, menikah, sekolah dll tanpa izin atau harus didampingi oleh suaminya atau anggota keluarga yang laki-laki yang paling dekat. Mengendarai kendaraan pribadi sendiri dapat memungkinkan perempuan untuk bepergian sendiri dan membawa pada percampurbauran antara laki-laki dan perempuan yang sangat bertentangan dengan norma dan aturan Islam. Kampanye mengemudi sudah dilakukan sejak tahun 1990-an, tepatnya tanggal 6 November 1990, dimana sekelompok perempuan memberanikan diri untuk mengendarai mobil mereka di Jalan King Abdul Aziz. Mereka diteriaki 'jalang', dilempari batu, kaca mobil mereka dipukul oleh masyarakat sekitar dan ditangkap oleh Muttawa, polisi keagamaan Saudi.<sup>4</sup> Akibatnya, mereka dipenjara dan didenda, dipaksa bersumpah tidak akan mengulangi hal yang sama. Setelah mereka dilepas, mereka kehilangan status mereka di masyarakat, dilarang bepergian, dilabeli 'tidak bermoral', dan dikucilkan.<sup>5</sup>Sehari setelah kejadian tersebut, Imam Besar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa bahwa aktivitas mengemudi bagi perempuan dilarang karena hal tersebut akan menyebabkan *gender mixing* yang diyakini dapat menyebabkan polemiksosial, ekonomi dan politik, karena perempuan dianggap memiliki fungsi dasar untuk memelihara rumah dan anak-

---

<sup>4</sup>Anders Jerichow, Saudi Arabia: Outside Global Law and Order : A Discussion Paper. (Surrey, England: Curzon, 1997), 76

<sup>5</sup>Hope Grigsby, "Women2Drive Movement Contemporary Saudi Consciousness on Women's Position in Society", (January 2015) : <https://www.researchgate.net/publication/313030929> (diakses 25 Agustus 2018)

anak, sehingga jika hal ini terjadi akan membuat pelencengan dari nilai-nilai tradisional tersebut.<sup>6</sup>

Kelompok perempuan Saudi kemudian melakukan serangkaian kampanye untuk mewujudkan perubahan sosial melawan norma yang begitu kuat dalam sejarah monarki ini agar mereka mendapatkan legitimasi untuk mengendarai kendaraan mereka sendiri di kota-kota Saudi. Setelah gerakan ini mengalami beberapa kali kegagalan, akhirnya pada tanggal 24 Juni 2018 Pangeran Muhammad bin Salman mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan perempuan mengemudi dan memberikan surat izin mengemudi untuk perempuan untuk pertama kalinya,<sup>7</sup> sehingga lebih dari 120.000 perempuan mendaftar untuk mendapatkan surat izin mengemudi.<sup>8</sup> Berbagai sekolah mengemudi di berbagai kota juga sudah membuka pendaftaran untuk perempuan yang ingin belajar mengemudi.

Perubahan yang begitu signifikan dimana Arab Saudi tidak lagi menjadi satu-satunya negara di era kontemporer ini yang melarang perempuan mengemudi di negaranya,<sup>9</sup> tidak terlepas dari perjuangan kelompok pergerakan perempuan Saudi yang berjuang dalam tiga dekade terakhir untuk mendapatkan hak izin mengemudi. Kampanye yang mereka lakukan dikenal melalui tagar *Women2Drive* yang mereka lakukan pasca Arab Spring menggunakan

---

<sup>6</sup>Viet Tran. "The Wrong Turn: Saudi Arabian Women Banned from Driving." Prospect Journal (2014) <http://prospectjournal.org/2014/04/08/the-wrong-turn-saudi-arabian-women-banned-from-driving/>. (diakses 25 Agustus 2018), 2

<sup>7</sup>Jamal Khashoggi, "Saudi Arabia's Women Can Finally Drive. But The Crown Prince Needs To Do Much More", The Washington Post, 25 Juni 2018

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Jehan Almahmoud, "Framing On Twitter: How Saudi Arabians Intertextually Frame The *Women2drive* Campaign" (Tesis, Georgetown University: 2015), 3

jejaring sosial Youtube, Facebook dan Twitter.<sup>10</sup> Hal ini dipengaruhi oleh *massive*-nya penggunaan media sosial di kawasan Arab pasca Arab Spring.

Penggunaan internet dan media sosial di kawasan Arab sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan *Arab Advisors Group* di Jordan, pertumbuhannya meningkat sangat tajam di mulai dari akhir tahun 2009 hingga tahun berikutnya, dimana 40 hingga 45 juta pengguna internet terekam di 16 negara Arab, dan angka ini hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.<sup>11</sup> Mesir dan Tunisia berada di urutan teratas negara-negara yang mengalami peningkatan pengguna media sosial pada tahun tersebut<sup>12</sup> akibat pergolakan yang terjadi di negara-negara tersebut tidak terlepas dari penggunaan media sosial oleh masyarakat yang menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan di negara mereka. Media sosial dan internet yang sebagian besar diakses melalui telepon seluler memainkan peran yang signifikan dalam penggalangan aksi protes di negara-negara tersebut. Para pengguna media sosial ini dapat mengumpulkan dan mengakses informasi berupa berita ataupun video dari seluruh dunia dengan lebih bebas. Tidak seperti berita di saluran-saluran televisi dan media cetak yang berada di bawah kontrol dan sensor pemerintah, media sosial dan internet memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan lebih bebas tanpa kendali pemerintah.<sup>13</sup> Hal yang sama juga terjadi di negara-negara berikutnya yang mengalami pergolakan seperti Libya dan Suriah, dimana media sosial digunakan

---

<sup>10</sup>Maurice Oline., 169

<sup>11</sup>Jawad Abbasi, "An Overview of the Arab Telecom and Broadband Markets and the Broadcast Media Industry in addition to Insights into Usage Patterns of New Media," Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies Symposium, March 22, 2010

<sup>12</sup>V. Tucker, *Divergence and Decline: The Middle East and the World after the Arab Spring*. (Washington: Freedom House, 2012), 3

<sup>13</sup>Abdul Qadir Mushtaq dan Muhammad Afzal, "Arab Spring: Its Causes And Consequences", *JPUHS* 30, No.1 (January-June, 2017), 5



untuk menghimpun kekuatan untuk menuntut akan perubahan sosial dan politik di negara mereka. Peristiwa yang dikenal dengan Arab Spring ini dideklarasikan oleh media sebagai “*social network revolutions*”<sup>14</sup> karena media sosial memberikan peran yang besar dalam menyebarkan revolusi ke seluruh kawasan Arab.

Implikasi dari penggunaan medial sosial di negara-negara tersebut yang berhasil menggulingkan pemerintahan yang sudah berkuasa selama bertahun-tahun menginspirasi gerakan-gerakan perempuan di berbagai negara Arab untuk mewujudkan impian mereka dalam upaya memperjuangkan hak mereka yang selama ini cenderung diabaikan. Mereka menyadari akan potensi dan pengaruh media sosial sebagai *platform* mereka untuk terlibat dan ikut serta dalam transisi demokrasi, transparansi, dan strategi pemerintahan. Hal ini dikenal dengan istilah *online/digital activism* yang memainkan peran krusial dalam berbagai pergolakan yang terjadi di kawasan Arab, di ranah politik maupun sosial.<sup>15</sup>

Aktivis digital perempuan percaya bahwa media sosial merupakan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pemikirannya, beradvokasi, memberikan pendapat di ranah publik dan memberdayakan diri mereka sendiri untuk menjadi masyarakat yang lebih aktif. Bagi perempuan Arab yang berjuang setiap saat melawan tekanan sosial dan anggapan merendahkan, internet dianggap sebagai *game-changer*, dimana ketika mereka *online* suatu ide yang biasanya diabaikan akibat konstruksi sosial dapat disampaikan dan dipertimbangkan dengan lebih

---

<sup>14</sup>Tucker, 5

<sup>15</sup>Mira Daher, “Women *Empowerment* through Technology and Social Media”, MEPI Capstone Project, 2012, 11-12

serius secara luas.<sup>16</sup>Aktivistis perempuan di kawasan Arab menjadi contoh bagaimana media sosial dapat mengubah konteks peran perempuan yang tradisional di masyarakat dan memasuki ruang *online* yang selama ini dipercaya sebagai ranah patriarki dimana perempuan tidak seharusnya berada.

Di Arab Saudi sendiri, penggunaan media sosial oleh perempuan untuk menunjukkan dan melawan ketidaksetaraan hak mereka di masyarakat juga diinspirasi oleh keberhasilan masyarakat menggulingkan kediktatoran pada saat kejadian pergolakan di kawasan Arab dengan didukung oleh penggunaan internet dan media sosial. Jika media sosial di negara-negara yang dilanda Arab Spring digunakan untuk reformasi politik, maka media sosial juga bisa digunakan untuk mewujudkan perubahan sosial yang fokus terhadap isu gender. Secara umum, jejaring *online* semakin dinilai sebagai media yang penting bagi perempuan untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, gejolak sosial yang terjadi di Arab Saudi yang dimotori oleh aktivis perempuan dan HAM merupakan bagian dari Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah seperti halnya yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya dan Suriah.<sup>17</sup> Bedanya, di Saudi mereka tidak menuntut perubahan rezim politik melainkan perubahan sosial berupa pemberian hak-hak perempuan dan perluasan batas-batas yang sebelumnya diberlakukan hanya untuk kaum perempuan. Perubahan sosial utama yang mereka inginkan adalah penghapusan

---

<sup>16</sup>Ibid., 3

<sup>17</sup>René Rieger, "In Search of Stability: Saudi Arabia and the Arab Spring", Gulf Research Centre, Cambridge, 2014, 1

sistem perwalian dan langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendapatkan kebebasan mengemudi bagi perempuan.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, sejumlah kampanye yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial menyangkut masalah kesetaraan di Arab Saudi pada awalnya dimulai pada tahun 2011 dimana seorang aktivis perempuan bernama Manal Alsharif merekam dirinya sendiri yang sedang mengemudikan mobil di jalanan kota Khobar, Arab Saudi, dan mengunggahnya di Facebook, Youtube dan Twitter dengan menggunakan *caption* “ajari Saya mengemudi agar Saya bisa melindungi diri Saya sendiri”.<sup>19</sup> Dalam video tersebut, ia memotivasi perempuan-perempuan Saudi lainnya untuk belajar mengemudi dan tidak bergantung pada laki-laki. Video tersebut kemudian dengan cepat menyebar dan mengundang berbagai respon baik berupa dukungan maupun kritikan. Akibatnya, perdebatan mengenai perilaku Alsharif yang dinilai menentang norma tradisional masyarakat Saudi semakin memanas dan ia pun ditangkap dan dipenjarakan walaupun pada akhirnya dilepaskan, serta menderita sejumlah kerugian sosial.<sup>20</sup> Peristiwa ini mendorong lebih banyak lagi kampanye di media sosial yang menuntut kesamaan hak dalam ranah publik dan pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan Saudi.<sup>21</sup> Peristiwa rekaman Manal tersebut menjadi awal langkah pergerakan aktivis perempuan Saudi untuk memperjuangkan hak mengemudi mereka dan mewujudkan perubahan sosial melawan konservatisme rezim Saudi secara *online*.

---

<sup>18</sup>Eman Al Nafjan, Reflections on Women in the Arab Spring, Middle East Program Woodrow Wilson International Center (2014)

<sup>19</sup>Lama Altoaimy, Driving Change on Twitter: A Corpus-Assisted Discourse Analysis of the Twitter Debates on the Saudi Ban on Women Driving, MDPI, 21 Mei 2016, 1

<sup>20</sup>Ibid., 3

<sup>21</sup>Ibid.

Setelah adanya serangkaian kampanye dari gerakan *Women2Drive*, pada bulan November 2014 pemerintah Saudi membuka suatu rapat yang membahas mengenai hak mengemudi bagi perempuan, menanggapi tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh kelompok-kelompok perempuan melalui serangkaian kampanye mereka. Mereka mulai mendiskusikan kemungkinan perempuan yang berumur di atas 30 tahun dapat mengendarai mobil mereka pada jam-jam tertentu. Sementara itu, perempuan Saudi masih belum diizinkan untuk mengemudi namun kampanye dan gerakan untuk hak mengemudi masih terus berlanjut dan merambat hingga pada level regional dan global dan membawa isu tersebut ke agenda internasional.<sup>22</sup> Aspek-aspek yang mempengaruhi diskursus yang begitu cepat berganti dan berubah ini dipercaya berasal dari internet, khususnya media sosial.

Berdasarkan pada capaian tersebut, dirasa penting untuk meneliti dan menganalisa bagaimana gerakan *Women2Drive* melalui sosial media dalam membantu gerakan perempuan Saudi dalam '*women's empowerment*' ditengah tradisi masyarakat yang masih kental akan budaya patriarki dan dominasi laki-laki di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Budaya patriarki yang sangat kuat di dalam kehidupan sosial politik masyarakat Saudi menciptakan norma-norma yang konservatif dan batas-batas ruang gerak bagi kaum perempuan. Dominasi laki-laki terasa di setiap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu norma sosial yang sangat memberatkan bagi perempuan adalah mereka dilarang mengemudi di jalanan di Arab Saudi.

---

<sup>22</sup>Freddy Mayhew, "Saudi Arabia Could Lift Ban on Women Drivers." *The Independent*. 8 Nov. 2014



Aturan ini sudah terkonstruksi secara sosial dan menjadi tradisi masyarakat bahwa perempuan tidak boleh mengemudi.

Kelompok perempuan Saudi telah memulai perjuangan mereka agar perempuan diizinkan mengemudi sejak tahun 1990, namun selalu mengalami kegagalan. Hingga pada tanggal 24 Juni 2018, Arab Saudi mencabut aturan pelarangan mengemudi bagi perempuan dimana sebelumnya negara ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan mengemudi di negaranya ditengah-tengah dunia kontemporer saat ini. Perubahan sosial yang diimpi-impikan oleh kaum perempuan Saudi yang ingin mengemudikan kendaraan mereka untuk menunjang kehidupan sehari-hari akhirnya dapat terwujud di tengah masyarakat konservatif yang memiliki tradisi patriarki yang sangat kuat. Internet dan sosial media melalui gerakan *online* bernama *Women2Drive* diyakini menjadi aspek utama perjuangan perempuan Saudi yang akhirnya membuahkan hasil tersebut, dimana mereka mampu menciptakan suatu perubahan sosial yang begitu signifikan di masyarakat yang sangat konservatif seperti Arab Saudi.

Untuk itu, pada tulisan ini peneliti mencoba melihat bagaimana bentuk *empowerment* yang dilakukan oleh gerakan *Women2Drive* ini untuk mewujudkan reformasi sosial yaitu pencabutan larangan perempuan untuk mengemudi.

### **1.3. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana bentuk *women's empowerment* yang dilakukan oleh gerakan *Women2Drive* ini mengenai perizinan perempuan untuk mengemudi.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk *women's empowerment* yang dilakukan gerakan *Women2Drive* dalam mewujudkan perubahan sosial di Arab Saudi.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan alat analisis teori dan konsep dalam studi hubungan internasional terkait dengan kajian perempuan dan gerakan sosial,
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi dan komunitas perempuan dalam usaha mewujudkan reformasi sosial di masyarakat, dan
- c. Menambah referensi dan kepustakaan ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil negara.

#### 1.6. Kajian Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diambil peneliti bersandar pada beberapa kajian pustaka yang dinilai sesuai dan memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Kajian pustaka yang pertama yang penulis rujuk dalam menganalisis judul yang diangkat adalah tulisan dari Victoria A. Newsom dan Lara Lengel dengan judul *Arab Women, Social Media, And The Arab Spring: Applying The Framework of Digital Reflexivity to Analyze Gender and Online Activism*. Tulisan ini diterbitkan oleh Brigdewater University dalam Jurnal Kajian Perempuan

Internasional di Massachusetts pada tahun 2012. Dalam tulisan ini dibahas mengenai keterlibatan feminis Arab dalam *online activism* khususnya selama masa revolusi di Mesir dan Tunisia untuk membantu terwujudnya perubahan sosial.<sup>23</sup>

Tulisan ini meneliti bagaimana aktivis feminis Arab memobilisasi, menghasilkan informasi dan pengetahuan dan mengembangkan serta menyebarkan sumber informasi secara *online*. Newsom dan Lengel menjelaskan bagaimana diskursus-diskursus aktivis *online* ini berfungsi baik secara lokal maupun global. Untuk itu, mereka menggunakan suatu skema yang dinamakan refektivitas digital untuk menganalisa produksi dan konsumsi informasi. Mereka menekankan pada bentuk ideal dari pengetahuan lokal yang berubah menjadi pengetahuan global, namun semakin tinggi tingkatan diseminasinya, ide utama dari pengetahuan tersebut semakin tidak terlihat. Melalui penerapan ini, mereka menyimpulkan bagaimana pengetahuan mengenai gender dikonstruksi, diintisarikan, direkonstruksi dan dibuat tidak terlihat oleh perusahaan media Barat. Kita bisa melihat bagaimana pengetahuan ini digunakan sebagai bentuk *empowerment*, berfungsi pada tahap awal dan lokal namun semakin kabur ketika ditranslet ke tahap global. Selain itu, melalui refleksivitas digital ini bisa dilihat konflik antara representasi dari peran perempuan yang diperkuat selama transformasi sosial di Arab dan ketiadaan perubahan sosial yang berbasis gender.

---

<sup>23</sup>Victoria A. Newsom dan Lara Lengel, "Arab Women, Social Media, And The Arab Spring: Applying The Framework of Digital Reflexivity to Analyze Gender and *Online Activism*", *Journal of International Women's Studies* 5, no. 13 (Oktober 2012): 32

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kerangka konseptual dan unit analisis dimana Newsom dan Lengel menggunakan teori Revlektivitas Global dalam menjelaskan bagaimana media sosial digunakan dalam partisipasi politik perempuan Arab dan bagaimana gagasan lokal menjadi semakin kabur ketika gagasan tersebut sampai di level global akibat penyebaran informasi melalui media sosial. Sementara, penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan unit analisa perempuan Saudi dan kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan adalah bagaimana *empowerment* bisa dicapai melalui suatu gerakan yang bersifat *unconvensional*.

Kajian selanjutnya yang menjadi rujukan penulis adalah tulisan yang ditulis oleh Nora Doaji dengan judul *Saudi Women's Online Activism: One Year of the "I am My Own Guardian" Campaign*, diterbitkan oleh *Arab Gulf States Institute* di Wahington pada tahun 2017. Tulisan ini secara umum menjelaskan mengenai serangkaian aktivisme perempuan yang dilakukan oleh kelompok perempuan Saudi dari tahun 1970-an dan secara khusus membahas kampanye perempuan melawan sistem *male guardianship* atau perwalian oleh laki-laki di Arab Saudi pada tahun 2016.<sup>24</sup> Dalam tulisannya, Daoji menjelaskan bagaimana kampanye untuk mengakhiri *male guardianship* ini diawali dengan aktivitas tokoh-tokoh feminis dan HAM di Saudi mengangkat topik ini dan meningkatkan kesadaran publik akan ketertekanan perempuan karena sistem tersebut melalui media masa CNN dan BBC. Landasan utama argumen mereka adalah laporan yang dikeluarkan *Human Right Watch* pada tanggal 17 Juli 2016 mengenai sistem perwalian seperti ini. Untuk memperluas kampanye mereka, media sosial seperti

---

<sup>24</sup>Nora Doaji, "Saudi Women's *Online* Activism: One Year of the "I am My Own Guardian" Campaign", Arab Gulf States Institute, no. 11, (Oktober 2017), 2.



Twitter kemudian digunakan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang lebih beragam dengan menggunakan tagar seperti *#TogetherToEndMaleGuardianship*, *طاقسب قىلاولا*, *#عم اهانلا قىلاو لجرلا بلع ةأرملا*, *#StopEnslavingSaudiWomen*, dan *#تايدوعس بلاطن*. Daoji menganalisis pengaruh keadaan sosial dan politik Saudi pada saat itu dalam memberikan kemudahan bagi kampanye ini untuk mencapai tujuannya. Kenaikan King Salman bin Abdulaziz sebagai Sultan serta anaknya, Mohammed bin Salman, sebagai peneran dan munculnya pemikiran populisme Saudi membawa perubahan yang signifikan dalam kampanye perwalian ini. Dengan mengambil keuntungan dari konteks sosial dan politik yang baru tersebut, para aktivis mampu untuk menyatukan dan memberi energi kepada perempuan Saudi untuk mendapatkan hak mereka.

Tulisan ini dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan isu yang diangkat. Jika tulisan Daoji mengangkat isu perwalian di Arab Saudi dan kampanye untuk mengakhiri sistem tersebut, sementara penelitian yang akan penulis lakukan mengangkat isu pelarangan perempuan mengemudi di Saudi dan gerakan yang dilakukan untuk mencabut larangan tersebut.

Kajian pustaka selanjutnya yang peneliti gunakan adalah tulisan dari Dr. Vipin K. Sharma yang berjudul *Women's Empowerment and Communication* dimana dia membahas *empowerment* perempuan India dari aspek teknologi komunikasi. Dr. Sharma menjelaskan bahwa *empowerment* perempuan hanya bisa dicapai jika status sosial dan ekonomi mereka diperbaiki dengan cara membuat kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan *total development* untuk perempuan sehingga mereka bisa menyadari bahwa mereka memiliki potensi

untuk menjadi manusia yang kuat.<sup>25</sup> Lebih lanjut, Dr. Sharma menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi menciptakan peluang bagi perempuan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik, sosial, dan ekonomi. Sayangnya, peran komunikasi untuk mendorong adanya kesetaraan gender terhalangi oleh akses, literasi yang rendah, dan penggunaan teknologi komunikasi yang terbatas bagi perempuan.

Jika penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada bagaimana *empowerment* di Saudi dapat dilakukan dengan cara *online activism*, tulisan ini lebih membahas kenapa *empowerment* di India masih belum maksimal dan hubungannya dengan teknologi komunikasi.

Artikel selanjutnya yang menjadi rujukan penulis adalah tulisan dari Lama Altoaimy yang berjudul *Driving Change on Twitter: A Corpus-Assisted Discourse Analysis of the Twitter Debates on the Saudi Ban on Women Driving*, diterbitkan oleh MDPI pada tahun 2018. Tulisan ini mengelaborasi bagaimana Twitter digunakan dalam perdebatan mengenai hak perempuan untuk mengemudi di Arab Saudi.<sup>26</sup> Altoaimy mengumpulkan serangkaian cuitan pengguna Twitter di Saudi yang berhubungan dengan topik ini dari tahun 2015. Dengan menggunakan pendekatan diskursus *corpus-assisted*, ia menganalisa argumen-argumen yang diutarakan oleh pengguna Twitter yang membicarakan mengenai pelarangan perempuan mengemudi yang kemudian berpengaruh pada munculnya respon pemerintah akan isu ini dan juga meningkatkan kesadaran mengenai hambatan-hambatan yang hanya diberikan pada kaum perempuan.

---

<sup>25</sup>Dr. Vipin K. Sharma, "Women *Empowerment* and Communication", Jazan University (Februari 2013), <https://www.researchgate.net/publication/283792952> (diakses 15 September 2018)

<sup>26</sup>Lama Altoaimy, 2

Tulisan ini lebih menekankan terhadap penggunaan Twitter dalam menengahkan isu pelarangan mengemudi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi permasalahan ini. Walaupun demikian, tulisan ini belum menjelaskan sejauh mana peran media sosial, dalam kasus ini Twitter, dalam mengupayakan diberikannya izin mengemudi kepada kaum perempuan Saudi. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan juga akan menjelaskan sejauh mana media sosial berperan dalam meng-*empower* perempuan dalam bentuk pencabutan larangan mengemudi.

Tulisan terakhir yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah artikel dari Julia Retta yang berjudul *Consequences of the Arab Spring for Women's Political Participation* yang diterbitkan oleh Baker Institute, Rice University. Tulisan ini menggunakan studi kasus di Tunisia dan Mesir untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam partisipasi politik perempuan dalam protes tersebut dan untuk menjelaskan perolehan yang tidak seimbang oleh perempuan pasca revolusi di faktor ekonomi, sosial dan politik.<sup>27</sup> Arab Spring membuktikan bahwa adanya penurunan kesenjangan gender dalam bentuk yang tidak konvensional untuk partisipasi politik, namun masih ada ketidaksetaraan dan hambatan-hambatan bagi perempuan di level pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, harus ada usaha yang lebih luas untuk mengembangkan ekonomi dan sosial yang dimulai dengan pengutamaan hak perempuan.

Tulisan ini dengan penelitian penulis masih sama-sama membahas *empowerment* dan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan sosial, namun tulisan ini mengambil unit analisa perempuan Tunisia dan Mesir pada masa Arab

---

<sup>27</sup>Julia Retta, "Consequences of the Arab Spring for Women's Political Participation", *Journal of Women and Human Rights in Middle East*, no. 1, (Fall 2013), 3

Spring dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai perempuan Saudi pasca Arab Spring.

### 1.7. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya mengenai bagaimana bentuk *empowerment* perempuan Saudi melalui gerakan *Women2Drive*, penulis menggunakan kerangka berpikir dimana konsep utamanya adalah *women's empowerment*. Salah satu cara untuk mewujudkan *empowerment* adalah dengan dilakukannya *social movement* atau gerakan sosial yang sejatinya untuk membongkar norma yang telah terkonstruksi secara sosial di dalam masyarakat. Uniknya, gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan Saudi berbeda dengan gerakan-gerakan perempuan sebelumnya yang terjadi di berbagai negara di dunia, dimana mereka menggunakan *platform* media sosial dan internet untuk mencabut larangan mengemudi bagi perempuan.

#### 1.7.1. *Empowerment*

Istilah *empowerment* merupakan suatu proses sosial yang bersifat multi dimensi dan proses ini membantu orang-orang untuk mendapatkan kontrol terhadap kehidupan mereka sendiri. Dalam hampir di setiap masyarakat dan di setiap segi kehidupan, perempuan dianggap memiliki posisi dan status yang tidak setara sehingga penting untuk memberdayakan atau *empower* diri mereka sendiri untuk menciptakan peluang yang setara. Isu mengenai *women's empowerment* telah menjadi salah satu perhatian baik oleh institusi pemerintah, maupun dari organisasi non-pemerintah. Namun, tidak ada kesepakatan yang bulat antara antar para ahli mengenai definisi mutlak terhadap *empowerment* ini, sehingga mereka membaginya berdasarkan berbagai perspektif dan konteks seperti sosial budaya,



ekonomi dan politik. Namun secara umum, istilah *empowerment* mencakup *self-strength, self-control, self-power, self-reliance, personal choice*, kemampuan untuk memperjuangkan hak, kemandirian, memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, kebebasan, dll.<sup>28</sup>

Penggunaan istilah *empowerment* ini pada dasarnya adalah untuk menunjukkan peningkatan kekuatan atau kemampuan dari kelompok yang dianggap lebih lemah sehingga menjadi lebih setara dengan kelompok yang dipandang memiliki *power* yang lebih tinggi sebelumnya.<sup>29</sup> Sementara itu menurut Sushama Sahay, *women's empowerment* sendiri adalah proses multi-dimensi yang memungkinkan perempuan untuk menyadari identitas dan kekuatan mereka di seluruh aspek kehidupan. Artinya, ada proses desentralisasi kekuasaan dan otoritas kepada orang-orang yang dinilai tertindas, lemah dan rentan dimana mereka sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan dan program baik dalam organisasi pemerintah maupun di masyarakat.<sup>30</sup> Lebih jauh lagi, Aspy dan Sandhu juga mendefinisikan istilah *empowerment* sebagai proses dalam memperoleh kontrol terhadap kehidupan mereka sendiri sementara tetap mendukung dan memfasilitasi orang lain dalam mendapatkan hal yang sama dalam kehidupan mereka.<sup>31</sup> Bank Dunia juga mendefinisikan istilah ini sebagai “proses peningkatan kapasitas seseorang atau suatu kelompok untuk menentukan pilihannya sendiri dan

---

<sup>28</sup>Keshab Chandra Mandal, “Concept and Types of Women *Empowerment*”, International Forum of Teaching and Studies 9, No. 2 (2013): 18

<sup>29</sup>Ibid., 19

<sup>30</sup>Ibid., 19

<sup>31</sup>C. B. Aspy dan D. S. Sandhu, *Empowering women for equity: A counseling Approach*. (Alexandria: American Counseling Association, 1999), 24

mengubah pilihan itu menjadi tindakan dan hasil yang diharapkan.”<sup>32</sup> Pusat dari proses ini adalah tindakan yang membangun individu tersebut dan aset bersama dan juga meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam konteks organisasional dan institusional yang mengatur penggunaan aset ini.<sup>33</sup>

#### 1.7.1.1. Dimensi *empowerment*

Mandal mengategorikan *empowerment* berdasarkan dimensi yang dipengaruhi, sebagai berikut:

##### a. *Social Empowerment*

*Social women's empowerment* menekankan pada penguatan hubungan dan posisi sosial perempuan dalam struktur masyarakat. *Empowerment* ini mengacu pada penolakan terhadap diskriminasi sosial yang ada di masyarakat yang berdasarkan disabilitas, ras, etnik, agama dan gender. *Empowerment* oleh perempuan ini memiliki makna bahwa perempuan harus bisa merasakan kesetaraan hak, kesetaraan status dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri seperti yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Menurut Griffin, perempuan harus memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, mengembangkan dirinya dan berkontribusi di semua level dan aspek di masyarakat, tidak hanya di rumah dan keluarga.<sup>34</sup>

##### b. *Educational Empowerment*

Dalam konsep tradisional, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkembang pula kemampuan personalnya. Pendidikan dianggap sebagai instrumen dalam perkembangan personal dimana seseorang dapat

---

<sup>32</sup>A. Chattopadhyay, “Women and Entrepreneurship”, *Yojana*, A Monthly Journal of Ministry of Information and Broadcasting 5, no. 1, (2005): 27

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Keshab Chandra Mandal, 20

meningkatkan horizon intelektual, kesejahteraan dan potensi mereka dalam *empowerment* diri.<sup>35</sup> Menurut S. Rao, perempuan penting diberi kebebasan dan akses yang setara dalam menempuh pendidikan sehingga mereka mampu memahami dan menyadari hak dan kewajiban mereka di segala aspek sehingga hal ini memungkinkan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak penting.<sup>36</sup> Tidak hanya itu, perempuan yang berpendidikan akan menguntungkan orang-orang disekitarnya. Ibu yang berpendidikan lebih baik berkali lipat dibanding guru yang dibayar.

Mandal meyakini bahwa pendidikan dapat memberikan percaya diri, membangun harga diri dan *self-sufficiency* pada diri seseorang. Pendidikan “membawa pada pengharapan; meningkatkan kesadaran sosial, politik intelektual, budaya dan keagamaan; memperluas wawasan berfikir dan toleransi; dan menghilangkan kefanatikan, kesempatan berfikir, dan kepercayaan akan takhayul.”<sup>37</sup>

Dalam hal ini, Shaik dan Rao menekankan kembali bahwa *empowerment* perempuan merupakan keadaan yang mencerminkan level tertentu dari kesadaran mereka mengenai realitas eksternal dan merupakan sebuah kesadaran akan keadaan internal tentang konstruksi pemikiran dan sistem kepercayaan yang mempengaruhi keadaan diri mereka dalam konteks keadilan gender dan sosial. *Women's empowerment* juga bermakna sebagai kebebasan dalam menentukan untuk menggunakan sumber daya intelektual, fisik, emosional dan spiritual dalam melindungi hidupnya dan menjaga nilai yang menjamin kesetaraan di level

---

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>P.H. Sethumadhav Rao, Education for Women's *Empowerment*. In Promilla Kapur (ed.), *Empowering the Indian Women*. (Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India: New Delhi, 2001)

<sup>37</sup>Keshab Chandra Mandal, 20

personal, sosial, ekonomi, politik dan institusi.<sup>38</sup> Karena kesadaran akan hal eksternal dan internal yang didapatkan melalui pendidikan ini, perempuan akan berusaha untuk mengemansipasi diri mereka keluar dari kebodohan, keterkekangan dan ketidaktahuan.

*c. Economical Empowerment*

*Empowerment* perempuan dalam konteks ekonomi adalah melalui *employment* dalam konteks ini bermakna sebagai suatu proses dimana perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya material, manusia, intelektual seperti ilmu pengetahuan, informasi, dan ide, finansial seperti uang dan akses terhadap uang tersebut. Selain itu, perempuan juga seharusnya mendapatkan tempat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, komunitas, masyarakat, dan negara.<sup>39</sup> *Empowerment* ekonomi dapat dicapai dengan menciptakan kesetaraan peluang kerja, kesamaan perlakuan kerja dan dagang, kesetaraan perolehan keuntungan, dan kesetaraan lingkungan kerja.<sup>40</sup>

*d. Political Empowerment*

Salah satu kunci penting dalam *empowerment* adalah besarnya akses perempuan dalam partisipasi politik di semua level dan struktur pemerintahan. Pada dasarnya, *empowerment* pada perempuan bukan berarti memberikan kekuatan pada perempuan, karena setiap manusia pada dasarnya telah memiliki kekuatan tersebut. *Empowerment* berarti membiarkan kekuatan tersebut keluar

---

<sup>38</sup>N. M. Shaikh dan D.M.U. Rao, "IT for *Empowerment* of Women". *Yojana*, a Monthly Journal of Ministry of Information and Broadcasting, (New Delhi, 2003), 76

<sup>39</sup>P. Kapur, *Empowering the Indian Women*. (Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India : New Delhi, 2001).

<sup>40</sup>*Ibid.*



dan terlihat.<sup>41</sup> Untuk memunculkan kekuatan ini, perempuan membutuhkan akses yang setara dengan kelompok lain yang dianggap dominan dalam ranah sosial dan politik.

Selain itu, *empowerment* perempuan di aspek politik juga mencakup desentralisasi kekuasaan dan otoritas kepada orang-orang yang lemah, termarginalkan, dan tertekan dimana sebelumnya mereka tidak mampu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dan program baik di level pemerintah maupun di level rumah tangga dan masyarakat. Menurut Tiwari, *empowerment* perempuan harus dimulai dengan menolak semua hambatan, kontrol, batasan, norma dll yang hanya diterapkan pada kaum perempuan oleh budaya patriarki dan hal yang berhubungan dengan dominasi laki-laki di masyarakat.<sup>42</sup>

Untuk itu, diperlukan akses bagi perempuan dalam politik dan proses pengambilan keputusan karena semua bentuk kebijakan akan berdampak baik secara langsung maupun tidak pada kehidupan perempuan. Hadirnya perempuan sebagai representasi kaum mereka di ranah politik merupakan salah satu wujud *empowerment* dan partisipasi politik perempuan. Dalam bahasa Bidyut Mohanty (1999), memberdayakan perempuan secara politik adalah dengan menjadikan mereka mitra dalam pembuatan kebijakan.

Secara tradisional, konsep politik selalu dihubungkan dengan pemerintahan dan strukturnya. Namun, saat sekarang gagasan mengenai politik semakin luas dan berkembang mencakup pergerakan, pemogokan, protes,

---

<sup>41</sup>K. H. Blanchard, John P. Carlos, & A. Randolph, *Empowerment Takes More Than A Minute*. (San Francisco: Berrett-Koehler, 1996), 97

<sup>42</sup>R.S. Tiwari, *Feminism and Globalization Versus Indian Women Empowerment*. In Abha Avasti and A.K. Srivastava (eds.), *Modernity, Feminism and Women's Empowerment*, (Rawat Publication, New Delhi, 2001), 254

demonstrasi, dll sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam politik dan pemerintahan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, gerakan perempuan untuk menuntut dan tawar menawar dalam berbagai kebijakan di pemerintah menjadi usaha dalam memberdayakan kaum mereka secara politik.

*e. Psychological Empowerment*

Menurut Mandal, *empowerment* secara psikologis sampai pada tahap tidak hanya menolak norma-norma patriarki dan kewajiban sosial, namun juga memperkuat diri mereka secara psikologis. Ketika perempuan bergabung dengan institusi pendidikan, partai politik atau badan pengambil keputusan; mengemban pekerjaan dengan jabatan penting, bepergian ke tempat-tempat berbeda; menguasai lahan dan kekayaan mereka akan merasa kuat secara psikologi dan membangun rasa percaya diri, meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri, dan memegang kendali terhadap penghasilan dan diri sendiri. Hal tersebut juga memberikan mereka kekuatan mental dan kepuasan dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan, kehidupan, pembelajaran, penyesuaian secara personal dan situasi finansial.<sup>44</sup>

Kelima bentuk *empowerment* diatas akan penulis gunakan untuk mengidentifikasi jenis *empowerment* mana yang dilakukan oleh gerakan W2D.

1.7.1.2. Metode *Empowerment*

Terdapat beberapa metode-metode berbeda dalam *empowerment*. *Empowerment* dapat dicapai dengan cara menempuh pendidikan baik itu konvensional, vokasional, ilmiah, hukum, teknik, astrologi, dan astronomi;

---

<sup>43</sup>Keshab Chandra Mandal, 23

<sup>44</sup>Ibid., 24

menempati pekerjaan *white collar* dan meningkatkan kualitas enterprenerial; dan memperluas personalitas dan keterbukaan terhadap media masa dengan cara menempati posisi penting di perusahaan media masa lokal dan nasional.

Metode lainnya adalah partisipasi dalam proses politik. Partisipasi masyarakat yang aktif dan merata sangat penting dalam menjalankan fungsi unit-unit pemerintah. Sidney Verba et. al. (1978) menjelaskan berbagai cara dalam partisipasi politik dan ikut berperan aktif dalam mempengaruhi berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah. Menulis surat kepada perwakilan rakyat; memilih atau bergabung pada komunitas aksi; parade politik; kampanye dan gerakan sipil; bekerja untuk proyek dan program pembangunan; berpartisipasi dalam kelompok pemuda yang diorganisir oleh pemerintah, merupakan beberapa dari banyak cara untuk berpartisipasi dalam politik.<sup>45</sup>

Partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok perempuan Saudi dengan tujuan untuk mengubah kebijakan pelarangan mengemudi adalah dengan melalui kampanye dan gerakan sipil, namun dengan basis *online*.

Pada dasarnya, *empowerment* adalah suatu pencerahan atau *enlightment* dan tidak akan ada perkembangan tanpa pencerahan. Kualitas hidup seseorang tidak bisa hanya diukur oleh pendapatan ataupun umur yang panjang, namun lebih pada otonomi dan keamanan yang dinikmati perempuan dimana-mana.<sup>46</sup>

Pergerakan perempuan menjadi langkah dalam memberdayakan perempuan ketika perempuan mengalami penyiksaan secara fisik, dipermalukan secara psikologis, termarginalkan secara politis, ditekan secara sosial dan

---

<sup>45</sup>Ibid., 24

<sup>46</sup>Mercy Varghese, "Women *Empowerment* through Kudumbashree: A Study in Ernakulam District" Mahatma Gandhi University, (Mei 2012), 52

didiskriminasi secara ekonomi.<sup>47</sup> Kondisi yang seperti itu akhirnya memaksa mereka untuk berjuang mendapatkan hak mereka secara konstitusional sebagaimana yang dilakukan kelompok-kelompok perempuan di berbagai negara sejak abad ke-19 seperti perempuan Inggris yang menuntut reformasi undang-undang yang berkenaan dengan hak perceraian, perempuan Cina menuntut izin bagi perempuan untuk bekerja dan menjabat di kantor-kantor, perempuan New Zealand menuntut hak pilih politik mereka. Di abad ke-20, gerakan perempuan semakin kuat dan mencakup isu dan aspek yang lebih beragam.<sup>48</sup> Walaupun demikian, proses emansipasi dari kelompok perempuan ini masih belum rampung akibat lebih dominannya nilai-nilai patriarki dalam sistem yang menghalangi mereka untuk lebih otonom dan independen secara ekonomi, sosial dan politik.<sup>49</sup>

Gerakan atau *movement* atau *activism* pada tahun 1990-an masih dilakukan dengan cara yang konvensional. Gagasan atau ide gerakan dikembangkan dari lisan ke lisan, melalui tulisan atau pun orasi, kemudian massa melakukan serangkaian aksi protes yang diorganisir dengan cara yang konvensional. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media *online* yang didukung teknologi internet digunakan oleh aktivis sosial untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi mengenai gagasan yang mereka usung dan melalui media *online* mereka juga bisa menghimpun suara dan menggerakkan

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>N. Ashok Kumar, Do Women have Efficiency to Run the Urban Administration? in U.B.Singh, (ed.) *Empowerment of women in Urban Administration*, (New Delhi: Serials Publications, 2006), 110



massa untuk melakukan aksi protes dalam bentuk offline seperti parade, pawai, demonstrasi, dll.<sup>50</sup>

Jenis gerakan atau *activism* yang dilakukan oleh W2D adalah *online activism* karena penggunaan media *online* yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, dll dalam mendukung aksi mereka.

### 1.7.2. Social Media Activism

Gerakan dan kampanye W2D yang diusung oleh aktivis perempuan Saudi menggunakan media sosial sebagai ruang mereka dalam berinteraksi, menghimpun dan memperoleh informasi. Kegiatan *social media activism* merupakan bagian dari *online activism*. Keduanya merupakan gerakan yang dibangun dari interaksi antara orang-orang yang memiliki gagasan dan nilai yang sama, lalu ruang *online* kemudian digunakan untuk komunikasi mengenai ide tersebut.<sup>51</sup> Dalam *social media activism*, platform yang digunakan adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube dan sejenisnya.

*Social media activism* merupakan gerakan yang dikembangkan dalam ruang media sosial lalu kemudian dituangkan dalam aksi yang bersifat lebih konvensional atau *offline*, dan bisa juga sebaliknya. Komunitas yang dibangun dalam ruang media sosial ini biasanya dikembangkan melalui fitur media sosial *hashtag* atau tagar sehingga *feminist activism* dari media sosial dikenal dengan sebutan "*hashtag feminism*".<sup>52</sup>

K. Aberl mengibaratkan *social media activism* sebagai sebuah kelas seminar interaktif. Membaca *posting* dari organisasi atau tokoh tertentu seperti

---

<sup>50</sup>Katelyn Aberl, "Activism in Transition: Social Media Activism and the Contentious Politics of Social Change", The Ohio State University (April 2016): 6-7

<sup>51</sup>Ibid., 10

<sup>52</sup>Ibid., 12.

mendengarkan kuliah, mengomentari halaman tersebut seperti mengacungkan tangan untuk bertanya atau memberi komentar di kelas, dan *retweet*, *repost*, dan *share* seperti belajar melalui interaksi sesama siswa.

Para aktivis menggunakan media sosial dalam kegiatan mereka karena aplikasi ini memiliki kelebihan yang bisa menyederhanakan kegiatan mereka dalam *activism*. Tagar yang digunakan oleh gerakan perempuan di Saudi yaitu *#Women2Drive* membantu mereka dalam membangun komunitas yang pada waktu yang sama juga menarik perhatian masyarakat mengenai isu pelarangan mengemudi bagi perempuan dan mengetengahkan hak perempuan dalam isu tersebut. Dengan tagar, rekaman multimedia dan segala hal yang berhubungan dengan isu tersebut dapat dengan mudah dilacak dan kelompok perempuan dapat bergerak bersama-sama secara konstan.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mencari pola-pola umum interaksi dalam kelompok data yang dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>53</sup> Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana proses suatu upaya perubahan tatanan baik politik maupun sosial dalam suatu negara akibat adanya fenomena yang terjadi di luar negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional, deskriptif adalah sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan fenomena, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada kurun waktu

---

<sup>53</sup>Catherine Marchall dan Gretechen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3<sup>rd</sup> Edition* (California: Sage Publication, 1999), 150.

tertentu. Kegiatan deskriptif itu berwujud pengumpulan fakta, terutama fakta spesifik yaitu fakta yang bisa dibuktikan benar atau salah berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek atau kejadian. Kemudian, fakta-fakta tersebut digabungkan dalam suatu cara sehingga terbentuk generalisasi dimana fakta-fakta itu dirangkai menjadi pola-pola yang memiliki arti.<sup>54</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi dan menelaah data yang ada dengan melihat pola-pola hubungan dari kelompok data. Dalam menarik kesimpulan, peneliti tidak menggunakan prosedural statistik maupun teknik penghitungan data lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang dijelaskan adalah norma konservatif masyarakat Saudi yang memicu adanya keinginan perempuan untuk mengempowerment diri mereka sendiri dalam bentuk pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan dan fenomena yang akan dianalisis adalah gerakan W2D dalam mewujudkan *empowerment* untuk perempuan Saudi.

### **1.8.2. Batasan Masalah**

Batasan penelitian yang digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk *women's empowerment* oleh gerakan W2D di Saudi adalah pada upaya mereka mendekonstruksi norma mengemudi dan meningkatkan kesadaran publik akan hal tersebut dari tahun 2011 yang menjadi tahun dimulainya kampanye *Women2Drive* hingga tahun 2018 ketika dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai pencabutan larangan perempuan mengemudi di Saudi.

### **1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis**

Mochtar Mas'ood membagi sasaran analisis dalam penelitian hubungan internasional menjadi unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu unit yang

---

<sup>54</sup>Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES), 102-103

perilakunya yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan atau disebut juga sebagai variabel dependen. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan dipakai atau unit yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati atau disebut juga sebagai variabel independen.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah gerakan W2D dalam mewujudkan *empowerment* untuk perempuan Saudi dan unit eksplanasinya adalah norma konservatif masyarakat Saudi yang membatasi hak perempuan dalam mengemudi kendaraan mereka yang mengakibatkan munculnya keinginan perempuan untuk mengemudikan kendaraan mereka sendiri. Tingkat analisis pada penelitian ini yaitu negara Arab Saudi. Tingkat analisis menurut Goldstein membahas tentang kumpulan kondisi-kondisi domestik suatu negara baik itu sosial, ekonomi, politik dll yang mampu mempengaruhi tindakan negara di dalam arena internasional.<sup>56</sup> Dalam menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini, peneliti akan menjabarkan faktor dan kondisi domestik masyarakat Arab Saudi yang nantinya akan menjelaskan apa yang menyebabkan *women's empowerment* oleh gerakan W2D.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan berbasis internet yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun

---

<sup>55</sup>Ibid., 128.

<sup>56</sup>Joshua S. Goldstein dan Jon. C. Pevehouse, *Internasional Relation 10th Edition*. (USA: Pearson Education. 2014), 17.



informasi yang telah dahulu dimuat di artikel jurnal, surat kabar, buku, majalah dan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.<sup>57</sup>

Pada proses penelitian ini data utama yang akan diambil dari website resmi pemerintah Arab Saudi, aktivis perempuan dan gerakan *Women2Drive*. Data yang dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, berita, laporan serta pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan perempuan dan elit politik Saudi serta data lain yang dianggap perlu. Kemudian data pendukung yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, berita, laporan dan hasil survei, dan sumber lainnya yang terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini.

#### **1.8.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan dipilah dengan menggunakan strategi analisis data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau pun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>58</sup> Pengolahan data dilakukan dengan:

- 1) Mengumpulkan dan memilih informasi dari data dan sumber relevan dengan isu yang dibahas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penerbitannya.
- 2) Data yang telah didapatkan akan dikelompokkan dalam kategori unit analisa dan unit eksplanasi.
- 3) Melakukan interpretasi informasi atas data yang ada dan menggambarkan pola yang muncul dari kategori yang ada.

---

<sup>57</sup>Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 28.

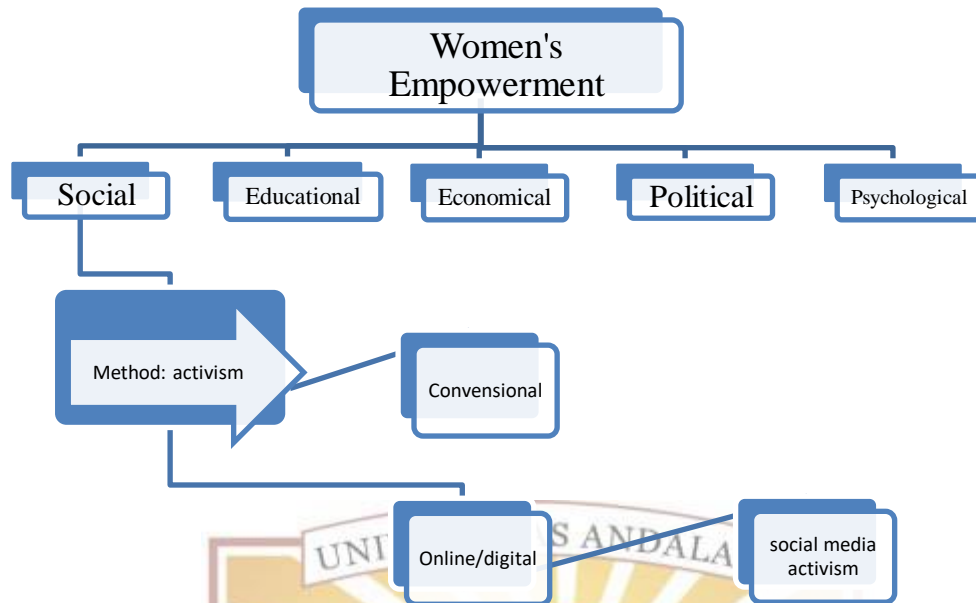
<sup>58</sup>Andrews, et all, "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflection", *The Grounded Theory Review*, Vol. 11, no. 1 (2012), 5.

- 4) Analisis sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dan menjadikan data tersebut sebagai indikator untuk konsep yang digunakan dan peneliti akan melakukan analisa terhadap hubungan unit-unit yang diteliti.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, penulis pertama akan menumpulkan data-data yang relevan tentang kondisi masyarakat Saudi yang membatasi hak mengemudi perempuan dan tentang gerakan W2D yang berjuang melawan hal tersebut. Kemudian penulis mengelompokkan data-data tersebut dalam kategori unit analisis dan unit eksplanasi, menguraikan terlebih dahulu unit analisis penelitian yaitu gerakan *Women2Drive* yang diusung kelompok perempuan Saudi dan tahap-tahap serta serangkaian aksi protes yang dilakukan perempuan Saudi atas dasar gerakan ini. Kemudian akan dijelaskan unitekplanasi yakni norma konservatif masyarakat Saudi yang membatasi hak perempuan dalam mengemudikan kendaraan mereka. Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi bentuk *empowerment* mana yang diupayakan oleh gerakan W2D, kemudian mencocokkan indikator-indikator yang ada. Setelah itu, akan dilanjutkan analisa bentuk *women's empowerment* berdasarkan uraian pada bagian kerangka konseptual, seperti yang ditunjukkan oleh Skema 1.1.

---

<sup>59</sup>John W. Cresswell, *Qualitative Inquiry & Reserach Design, Chooding Among Five Approaches*, (California: Sage Publication Inc. 2007), 163



Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual

## 1.9. Sistematika Penulisan

### BAB 1: Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB 2: Gerakan *Women2Drive* di Arab Saudi

Bagian ini menjelaskan latar belakang munculnya gerakan dan kampanye W2D di Saudi. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai realitas masyarakat Arab Saudi yang kental akan tradisi patriarki dan norma yang terkonstruksi secara sosial yang menjadi permasalahan utama dalam isu ini.

### BAB 3: Posisi Perempuan di dalam Masyarakat Arab Saudi

Bagian ini akan menjelaskan realitas kondisi kaum perempuan di masyarakat Arab Saudi yang konservatif dan kental akan tradisi patriarki dan batasan-batasan yang diletakkan pada perempuan di ruang publik.

#### **BAB 4: Bentuk *Women's Empowerment* oleh Gerakan W2D**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Gerakan W2D dalam meng-*empower* perempuan Saudi dalam bentuk tuntutan pencabutan larangan mengemudi.

